

## DAFTAR PUSTAKA

PAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

Salim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.

Sekiyat, Paidi. et al. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Nomor 3. Volume 12. Halaman 213-222. [www.journal.uji.ac.id](http://www.journal.uji.ac.id) (diakses tanggal 19 Maret 2012)

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset.

Mayono. 2011. *Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*. [Mitoyoso.blogspot.com/2011/01/sistem-akuntansi-pemerintah-daerah.html](http://Mitoyoso.blogspot.com/2011/01/sistem-akuntansi-pemerintah-daerah.html) (diakses tanggal 19 Maret 2012)

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Priyohari. 2010. *Analisis Pertumbuhan Dana Bagi Hasil*. [Priyohari.files.wordpress.com](http://Priyohari.files.wordpress.com) (diakses tanggal 19 Maret 2012)

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2006. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran. (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Makassar : Simposium Nasional Akuntansi X.

Sudirjat, M. Agus. 2005. *Analisis Rasio Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Ngawi)*. Skripsi. Jember : Universitas Jember.

Yudisiantono, Dian. 2008. *Pemetaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Timur*. Skripsi. Jember : Universitas Jember.

[www.blitar.go.id](http://www.blitar.go.id)

[www.dostoc.com](http://www.dostoc.com)

[www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20120511113332.pdf](http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20120511113332.pdf)

[www.ppid.blitarkota.go.id/doc/upload/591.pdf](http://www.ppid.blitarkota.go.id/doc/upload/591.pdf)

[www.rtrw.blitarkota.net/rtrw.php](http://www.rtrw.blitarkota.net/rtrw.php)